

REKOMENDASI COVID-19



**DINAS KESEHATAN KABUPATEN POSO
2026**

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang Penyakit

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. SARS-CoV-2 merupakan *coronavirus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai Pandemi.

Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. Untuk itu dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah COVID-19, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Penetapan didasari oleh pertimbangan bahwa *Infeksi Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) telah dinyatakan WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*. Selain itu meluasnya penyebaran COVID-19 ke berbagai negara dengan risiko penyebaran ke Indonesia terkait dengan mobilitas penduduk, memerlukan upaya penanggulangan terhadap penyakit tersebut.

Dilihat dari situasi penyebaran COVID-19 yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Keputusan Presiden tersebut menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan menetapkan KKM COVID-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, atas pertimbangan penyebaran COVID-19 berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, telah dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional.

Memasuki Minggu ke-12 tahun 2020, COVID-19 menunjukkan peningkatan di beberapa negara di kawasan Asia, yaitu Thailand, Hongkong, Malaysia maupun Singapura. Varian COVID-19 dominan yang menyebar di Thailand adalah XEC dan JN.1, di Singapura LF.7 dan NB.1.8 (turunan JN.1), di Hongkong JN.1, dan di Malaysia adalah XEC (turunan JN.1). Meski demikian transmisi penularannya masih relatif rendah, dan angka kematiannya juga rendah. Situasi COVID-19 di Indonesia memasuki minggu ke-20 saat ini menunjukkan tren penurunan kasus konfirmasi mingguan dari 28 kasus pada minggu ke-19 menjadi 3 kasus pada minggu ke-20 (positivity rate 0,59%), dengan varian dominan yang beredar adalah MB.1.1.

Pada tanggal 23 Mei 2025 Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit mengeluarkan Surat Edaran nomor : SR.03.01/C/1422/2025 tentang Kewaspadaan Terhadap Peningkatan Kasus Covid-19, selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2025 Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Edaran nomor : 19 Tahun 2025 tentang Kewaspadaan Terhadap Peningkatan Kasus Covid-19, berkaitan dengan hal tersebut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Himbauan nomor : 400.7.27/1730/Kesmas1.Dinkes tanggal 06 Juni 2025 tentang Kewaspadaan Terhadap Peningkatan Kasus Covid-19, ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Poso kepada Kepala Puskesmas dan Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Poso terkait Kewaspadaan Kasus Covid-19. Berdasarkan hasil pelaksanaan Surveilans Ketat Covid-19 sepanjang tahun 2025 di wilayah Kabupaten Poso, tidak ditemukannya kasus Suspek maupun Konfirmasi Covid-19, hal ini menunjukkan bahwa hingga saat ini wilayah Kabupaten Poso masih dalam kondisi aman atau *Zero Case Covid-19*.

b. Tujuan

1. Memberikan panduan bagi daerah dalam melihat situasi dan kondisi penyakit infeksi emerging dalam hal ini penyakit Covid-19.
2. Dapat mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan kejadian penyakit infeksi emerging di daerah Kabupaten Poso.
3. Dapat di jadikan dasar bagi daerah dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan penyakit infeksi emerging ataupun penyakit yang berpotensi wabah/KLB.

2. Hasil Pemetaan Risiko

a. Penilaian ancaman

Penetapan nilai risiko ancaman Covid-19 terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/abai, Untuk Kabupaten Poso, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

No.	SUB KATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	Risiko Penularan dari Daerah Lain	RENDAH	40.00%	0.00
2	Risiko Penularan Setempat	SEDANG	60.00%	75.00

Tabel 1. Penetapan Nilai Risiko Covid-19 Kategori Ancaman Kabupaten Poso Tahun 2026

Berdasarkan hasil penilaian ancaman pada penyakit Covid-19 terdapat 0 subkategori pada kategori ancaman yang masuk ke dalam nilai Risiko Tinggi.

Berdasarkan hasil penilaian ancaman pada penyakit Covid-19 terdapat 1 subkategori pada kategori ancaman yang masuk ke dalam nilai Risiko Sedang, yaitu :

1. Risiko Penularan Setempat

Berdasarkan hasil penilaian ancaman pada penyakit Covid-19 terdapat 1 subkategori pada kategori ancaman yang masuk ke dalam nilai Risiko Rendah, yaitu :

1. Risiko Penularan dari Daerah Lain

b. Penilaian Kerentanan

Penetapan nilai risiko Kerentanan Covid-19 terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/ abai, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

No.	SUB KATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	Karakteristik Penduduk	RENDAH	20.00%	30.17
2	Ketahanan Penduduk	RENDAH	30.00%	8.57
3	Kewaspadaan Kab/Kota	SEDANG	20.00%	57.14
4	Kunjungan Penduduk Ke Negara/ Wilayah Berisiko	RENDAH	30.00%	0.00

Tabel 2. Penetapan Nilai Risiko Covid-19 Kategori Kerentanan Kabupaten Poso Tahun 2026

Berdasarkan hasil penilaian kerentanan pada penyakit Covid-19 terdapat 0 subkategori pada kategori kerentanan yang masuk ke dalam nilai Risiko Tinggi.

Berdasarkan hasil penilaian kerentanan pada penyakit Covid-19 terdapat 1 subkategori pada kategori kerentanan yang masuk ke dalam nilai Risiko Sedang, yaitu :

1. Kewaspadaan Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil penilaian kerentanan pada penyakit Covid-19 terdapat 3 subkategori pada kategori kerentanan yang masuk ke dalam nilai risiko Rendah, yaitu :

1. Karakteristik Penduduk
2. Ketahanan Penduduk
3. Kunjungan Penduduk Ke Negara/ Wilayah Berisiko

c. Penilaian Kapasitas

Penetapan nilai risiko Kapasitas Covid-19 terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/ abai, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini

No.	SUB KATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	Anggaran Kewaspadaan dan Penanggulangan	SEDANG	25.00%	42.65
2	Kesiapsiagaan Laboratorium	RENDAH	8.75%	35.71
3	Kesiapsiagaan Puskesmas	TINGGI	8.75%	87.50
4	Kesiapsiagaan Rumah Sakit	TINGGI	8.75%	81.82
5	Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota	TINGGI	8.75%	92.00
6	Surveilans Puskesmas	TINGGI	7.50%	80.00

7	Surveilans Rumah Sakit (RS)	TINGGI	7.50%	83.33
8	Surveilans Kabupaten/Kota	SEDANG	7.50%	46.00
9	Surveilans Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK)	RENDAH	7.50%	0.00
10	Promosi	RENDAH	10.00%	33.33

Tabel 3. Penetapan Nilai Risiko Covid-19 Kategori Kapasitas Kabupaten Poso Tahun 2026

Berdasarkan hasil penilaian kapasitas pada penyakit Covid-19 terdapat 3 subkategori pada kategori kapasitas yang masuk ke dalam nilai Risiko Rendah, yaitu :

1. Kesiapsiagaan Laboratorium
 - Kapasitas pemeriksaan spesimen COVID-19 belum sepenuhnya tersedia secara mandiri di tingkat Kabupaten Poso.
 - Ketergantungan terhadap laboratorium rujukan dapat memperpanjang waktu pemeriksaan.
 - Kesiapan jejaring pengiriman spesimen masih perlu diperkuat.
 - Ketersediaan bahan dan logistik pemeriksaan perlu dijamin secara berkelanjutan.
2. Surveilans Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK)
 - Integrasi informasi surveilans BKK dengan surveilans kabupaten belum optimal.
 - Tidak semua mobilitas penduduk dapat dipantau melalui pintu masuk.
 - Koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah masih perlu diperkuat.
3. Promosi Kesehatan

Karena pada kondisi kasus COVID-19 yang relatif terkendali, kegiatan KIE biasanya tidak lagi dilakukan dengan intensitas seperti pada masa pandemi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan frekuensi edukasi, sosialisasi, kampanye perilaku hidup bersih dan sehat, serta komunikasi risiko COVID-19 menurun. Hal ini menjadi kelemahan kapasitas apabila terjadi peningkatan kasus secara tiba-tiba, karena masyarakat perlu segera mendapatkan informasi yang benar mengenai gejala, cara penularan, pencegahan, serta kapan harus mencari pelayanan kesehatan

d. Karakteristik risiko (tinggi, rendah, sedang)

Penetapan nilai karakteristik risiko penyakit Covid-19 didapatkan berdasarkan pertanyaan dari pengisian Tools pemetaan yang terdiri dari kategori ancaman, kerentanan, dan kapasitas, maka di dapatkan hasil karakteristik risiko tinggi, rendah, dan sedang. Untuk karakteristik resiko Kabupaten Poso dapat di lihat pada tabel 4.

Provinsi	Sulawesi Tengah
Kota	Poso
Tahun	2026

RESUME ANALISIS RISIKO COVID-19	
KERENTANAN	20.83
ANCAMAN	45.00
KAPASITAS	55.49
RISIKO	38.71
Derajat Risiko	RENDAH

Tabel 4. Penetapan Karakteristik Risiko Covid-19 Kabupaten Poso Tahun 2026.

Berdasarkan hasil dari pemetaan risiko Covid-19 di Kabupaten Poso untuk tahun 2026, dihasilkan analisis berupa nilai ancaman sebesar 45.00 dari 100, sedangkan untuk kerentanan sebesar 20.83 dari 100 dan nilai untuk kapasitas sebesar 55.49 dari 100 sehingga hasil perhitungan risiko dengan rumus Nilai Risiko = (Ancaman x Kerentanan)/ Kapasitas, diperoleh nilai 38.71 atau derajat risiko **RENDAH**.

3. Rekomendasi

NO	SUBKATEGORI	REKOMENDASI	PIC	TIMELINE	KET
1	Kesiapsiagaan Laboratorium	- Memperkuat jejaring laboratorium rujukan COVID-19. - Memastikan ketersediaan logistik pengambilan dan pengiriman spesimen - Melakukan pemetaan kapasitas laboratorium secara berkala. - Mengintegrasikan hasil laboratorium dengan sistem surveilans.	Dinas Kesehatan	2027	
2	Surveilans Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK)	Memperkuat mekanisme pertukaran informasi antara Dinas Kesehatan dan BKK. Menyusun dan memastikan alur komunikasi serta tindak lanjut kasus dari pintu masuk sampai ke Puskesmas/fasilitas pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan	2027	

		Melakukan koordinasi berkala antara BKK, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan lintas sektor terkait kesiapsiagaan penyakit infeksi emerging. Meningkatkan kewaspadaan pada periode mobilitas tinggi, seperti hari raya, libur panjang, kegiatan besar, atau peningkatan perjalanan dari wilayah dengan peningkatan kasus.			
3	Promosi Kesehatan	- Mengaktifkan kembali komunikasi risiko COVID-19. - Meningkatkan kapasitas petugas Puskesmas dan promosi kesehatan - Mengintegrasikan hasil surveilans dengan komunikasi risiko	Dinas Kesehatan	September-Desember 2026	

01 Juli 2026

Kepala Dinas Kesehatan Kab.Poso



dr.N.Taufan Karwur

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19670527 199803 1 005

Penetapan Subkategori prioritas pada kategori kerentanan

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
1	KEWASPADAAN KAB/KOTA	20.00%	SEDANG
2	KETAHANAN PENDUDUK	30.00%	RENDAH
3	Kunjungan Penduduk Ke Negara/ Wilayah Berisiko	30.00%	RENDAH
4	KARAKTERISTIK PENDUDUK	20.00%	RENDAH

Penetapan Subkategori prioritas pada kategori kapasitas

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
1	Kesiapsiagaan Laboratorium	8.75%	RENDAH
2	Surveilans Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK)	7.50%	RENDAH
3	Promosi	10.00%	RENDAH
4	Surveilans Kabupaten/Kota	7.50%	SEDANG
5	Anggaran Kewaspadaan dan Penanggulangan	25.00%	SEDANG

Poin-point masalah yang harus ditindaklanjuti

1	Ketersediaan bahan dan logistik Covid-19 pemeriksaan perlu dijamin secara berkelanjutan.
2	Koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah masih perlu diperkuat.
3	Semua mobilitas penduduk dapat dipantau melalui pintu masuk.
4	Belum optimalnya kapasitas promosi kesehatan terkait PIE
5	Kurangnya ketersediaan anggaran dikarenakan efisiensi program kegiatan

Rekomendasi

NO	SUBKATEGORI	REKOMENDASI	PIC	TIMELINE	KET
1	Kesiapsiagaan Laboratorium	- Memperkuat jejaring laboratorium rujukan COVID-19. - Memastikan ketersediaan	Dinas Kesehatan	2027	

		logistik pengambilan dan pengiriman spesimen - Melakukan pemetaan kapasitas laboratorium secara berkala. - Mengintegrasikan hasil laboratorium dengan sistem surveilans.			
2	Surveilans Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK)	Memperkuat mekanisme pertukaran informasi antara Dinas Kesehatan dan BKK. Menyusun dan memastikan alur komunikasi serta tindak lanjut kasus dari pintu masuk sampai ke Puskesmas/fasilitas pelayanan kesehatan. Melakukan koordinasi berkala antara BKK, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan lintas sektor terkait kesiapsiagaan penyakit infeksi emerging. Meningkatkan kewaspadaan pada periode mobilitas tinggi, seperti hari raya, libur panjang, kegiatan besar, atau peningkatan perjalanan dari wilayah dengan peningkatan kasus.	Dinas Kesehatan	2027	
3	Promosi Kesehatan	- Mengaktifkan kembali komunikasi risiko COVID-19. - Meningkatkan kapasitas petugas Puskesmas dan promosi kesehatan - Mengintegrasikan hasil surveilans dengan komunikasi risiko	Dinas Kesehatan	September-Desember 2026	

Tim penyusun

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Efriyanto Peoni, SKM	Staf Seksi Surveilans, Krisis Kesehatan dan Imunisasi	Dinkes Kab.Poso
2	Sri Andriany Susilawati, SKM	Staf Seksi Surveilans, Krisis Kesehatan dan Imunisasi	Dinkes Kab.Poso